

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan ada di Dunia ini bersama-sama dengan adanya Manusia, kehendak untuk berbuat jahat dalam kehidupan Manusia. Disisi lain manusia ingin tentram, tertib, damai dan berkeadilan. Artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai Negara Hukum, untuk menjalankan suatu Negara dan Perlindungan Hak asasi harus berdasar Hukum.¹

Hakikat hukum dan keadilan dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam, yang berarti bahwa dalam pergaulan hidup masyarakat maka akan selalu terkait pada masalah hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Hukum dan keadilan adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya.²

Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan Hukum sebagai supremasi Negara sebagaimana termaktub dalam UUD Pasal 1 ayat (3) tadi. Hal ini berimplikasi pada setiap perbuatan warga Negara Indonesia harus mengikuti ketentuan Hukum yang berlaku, termasuk didalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan.

Dewasa ini masalah Hukum Pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru di zaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak pengaturan didalamnya yang

¹ Pujiyono. 2007. *Kumpulan tulisan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Mandar Maju. Hal. 66.

² Suparni Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.1.

sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.³

Beberapa ketentuan dalam KUHP tersebut kemudian mengalami beberapa perubahan dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Ketentuan yang diubah dalam Perpu tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah ketentuan yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan dengan dikeluarkannya Perpu tersebut diubah menjadi *dua ratus lima puluh rupiah* yang sebelumnya hanya bernilai *dua puluh lima rupiah*. Hal ini didasarkan pada penyesuaian nilai barang yang mengalami kenaikan. Akan tetapi, pada selang waktu dikeluarkannya Perpu Nomor 16 Tahun 1960 sampai akhir tahun 2011 Pemerintah belum lagi melakukan penyesuaian nilai rupiah pada batas Tindak Pidana Ringan dalam KUHP tersebut. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada tidak efektifitasnya pasal-pasal yang mengatur Tindak Pidana Ringan dalam KUHP karena hampir tidak ada kasus-kasus yang terjadi memiliki objek perkara yang bernilai dua ratus lima puluh rupiah.⁴

Beberapa kasus pencurian ringan dengan nilai objek perkara yang tidak seberapa namun harus disidangkan dengan acara biasa dan dianjar dengan Hukuman yang tidak sebanding pun kemudian muncul ke permukaan media massa dan mendapat perhatian masyarakat. Kasus pencurian 3 buah kakao oleh nenek Minah yang terjadi pada tahun 2009, kasus pencurian enam buah piring dan sop buntut oleh nenek Rasminah pada tahun 2011, pencurian sandal jepit oleh AAL anak di bawah umur pada tahun 2011, pencurian 50 gram merica oleh seorang kakek pada tahun 2012, dan kasus pencurian semangka oleh sepasang suami isteri. Kasus-kasus diatas merupakan beberapa kasus yang kemudian muncul ke permukaan dan mendorong para penegak Hukum untuk lebih berlaku adil terhadap pelaku-pelaku tersebut. Hal ini bukan untuk menghapus unsur kesalahan dalam diri pelaku namun menyeimbangkan perbuatan yang dilakukan dan nilai objek perkara dengan proses Hukum dan Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka.⁵

Berbeda dengan bentuk tindak pidana lainnya, Tindak Pidana Ringan memiliki acara pemeriksaan tersendiri. Pada dasarnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur beberapa bentuk

³ Suparni Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 1.

⁴ Femi Anggraini. 2012. *Perkara Tindak Pidana Ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam Kuhp serta Perbandingannya dengan Perancis*. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Hal. 3.

⁵ *Ibid.*

pemeriksaan perkara Pidana, yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan undang-undang, dihadiri oleh penuntut umum. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman Hukumannya 5 tahun ke atas dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan “acara biasa”.⁶ Perkara yang dinilai pembuktiannya mudah dengan ancaman Hukuman yang relatif lebih rendah diperiksa dengan “acara singkat” atau sumir. Kita mengenal tiga jenis acara pemeriksaan perkara pidana pada sidang Pengadilan Negeri :

1. Acara Pemeriksaan Biasa, diatur dalam bagian ketiga Bab XVI
2. Acara Pemeriksaan Singkat, diatur dalam bagian kelima Bab XVI
3. Acara Pemeriksaan Cepat, diatur dalam bagian keenam Bab XVI yang terdiri dari dua jenis, yaitu :
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.⁷

Berdasarkan Pasal 205-210 KUHP acara pemeriksaan cepat dapat dilakukan terhadap kasus Tindak Pidana Ringan. Ketentuan tersebut sudah jarang digunakan karena pasal-pasal tindak pidana ringan hanya mengatur perkara pidana dengan nilai objek perkara dua ratus lima puluh rupiah yang kemudian dapat diancam dengan Hukuman tiga bulan penjara atau kurungan dan denda Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ruopiah). Oleh sebab itu, sangat kurang adil apabila tindak pidana dengan objek tidak begitu besar harus diancam dengan ancaman pidana misalnya lima tahun penjara.⁸

Pada tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379

⁶ Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 104.

⁷ *Ibid.*

⁸ Femi Anggraini, *Op.cit.* hal.7

(penipuan ringan), 384 (penipuan ringan oleh penjual), 407 ayat (1) (pengrusakan ringan) dan 482 (penadahan ringan) dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.⁹

Mengenai latar belakang Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut, adalah karena sudah kurang relevannya ketentuan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP peninggalan Belanda dengan situasi dan kondisi masa kini. Selain itu, alasan lainnya yakni banyaknya perkara yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan namun diproses Hukum menjadi tindak pidana biasa. Misalnya, pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), yang ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah) diproses secara Hukum oleh penyidik dan dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum dengan menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP, yang ancaman pidana penjaranya paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dengan alasan kerugiannya sudah melebihi dua ratus lima puluh rupiah.¹⁰

Keluarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 diyakini akan menjadi awal bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung. Sesuai dengan visi dari badan peradilan di Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 24 UUD NRI 1945 Perubahan III ayat (1), Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan.¹¹

Seiring perkembangan konsep keadilan restoratif mulai digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi tindak pidana ringan. Dasar yang dipakai hakim dalam menerapkan suatu putusan dengan konsep keadilan restoratif adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

⁹ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

¹⁰ Albert Aries. *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, <http://www.Hukumonline.com/2013>, diakses tanggal 23 Maret 2017

¹¹ Harifin. *Perma diakhir masa jabatan*, <http://www.haluankepri.com/2012> diakses tanggal 7 November 2016

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Jika dimaknai “menggali” tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa sebenarnya Hukumnya sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²

Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan dan tidak menerapkan Perma tersebut. Seperti Putusan PN Simalungun Nomor : 42/Pid.C/2015/PN.Sim. atas nama terdakwa Lisbon Jawanter Hutasoit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian ringan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit senilai Rp.300.000,00 dengan pidana penjara selama 2 bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Putusan PN Jember Nomor : 125/Pid/C/2016/PN.Jmr atas nama terdakwa 1. Gunarto terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” 2. Suyoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

¹²Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.Hal. 13.

melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penadahan” dengan pidana penjara masing-masing selama 3 bulan. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan Memerintahkan barang bukti berupa : 77 (tujuh puluh tujuh) buah semangka dikembalikan kepada saksi korban Hari Wiyuliono. Ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP. Putusan dari Kedua Pengadilan Negeri tersebut telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Namun terdapat Putusan Tindak Pidana Ringan dari Pengadilan Negeri yang diuraikan sebelumnya dengan kasus yang sama, yaitu PN Simalungun dan PN Jember tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Seperti, Putusan PN Simalungun Nomor: 498/Pid.B/2013/PN.Sim atas nama terdakwa Gunawan Purba telah sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pencurian dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 11 type RH-130 dan uang sebesar Rp.171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan Pidana Penjara selama 6 Bulan dan Putusan PN Jember Nomor: 626/Pid.B/2014/PN.Jmr atas nama terdakwa Jumadin telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Penadahan 50 kg getah karet senilai

Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dengan Pidana Penjara selama 4 Bulan 15 hari.

Kedua Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang menentukan bahwa :

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan yang seharusnya segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP”.

Hakim tidak memakai proses pemeriksaan cepat melainkan proses pemeriksaan biasa.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN NORMATIF PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERKAIT ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM”**

B. Pembatasan Dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan fokus, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya pada pelaksanaan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dan penadahan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terkait penyelenggaraan acara pemeriksaan cepat dalam putusan Hakim perkara pencurian ringan dan penadahan ringan ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ?
- b. Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam putusan Hakim terkait penjatuhan sanksi terhadap perkara pencurian ringan dan penadahan ringan ditinjau dari aspek Kepastian Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terkait penyelenggaraan acara pemeriksaan cepat dalam putusan Hakim perkara pencurian ringan dan penadahan ringan ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam putusan Hakim terkait penjatuhan sanksi terhadap perkara pencurian ringan dan penadahan ringan ditinjau dari aspek Kepastian Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penulisan Tugas Akhir ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam bidang ilmu Hukum khususnya Hukum pidana dan Aspek kepastian Hukum di Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperbarui informasi seputar Hukum pidana dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gagasan kepada Pemerintah khususnya Mahkamah Agung mengenai bagaimana implikasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini juga sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana, sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan pengembangan pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan Hukum khususnya Hukum pidana

tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan Aspek kepastian Hukum di Masyarakat.

2. Bagi akademisi

Penulisan Hukum ini juga diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Penasehat Hukum maupun masyarakat pada umumnya sehingga menjadi pertimbangan objektif dalam memahami dan mengkritisi penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yakni melihat Hukum sebagai perilaku Manusia dalam Masyarakat.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menekankan pada penggunaan data primer yang diperoleh melalui hasil studi pustaka. Tipologi Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Ditinjau dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena memberikan gambaran bagaimana perkara tindak pidana pencurian ringan dan penadahan ringan ditangani sesudah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Dilihat dari segi bentuk, tipe penelitian ini adalah analitis karena mengkaji penerapan Peraturan

¹³Sidik Sunaryo. 2012. *Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*. Malang. UMM PRESS. Hal. 18.

Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 terhadap penanganan tindak pidana pencurian ringan dan penadahan ringan di Indonesia.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif.¹⁴

Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PERMA No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Negeri :

- a) Putusan PN Simalungun Nomor : 42/Pid.C/2015/PN.Sim.
- b) Putusan PN Jember Nomor : 125/Pid.C/2016/PN.Jmr
- c) Putusan PN Simalungun Nomor: 498/Pid.B/2013/PN.Sim
- d) Putusan PN Jember Nomor: 626/.Pid.B/2014/PN.Jmr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer.¹⁵ antara lain Terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan

¹⁴ Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. Hal.141.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asiiikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Grafindo Persada. Hal. 119.

dengan pencurian dan penadahan dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan Hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder seperti Ensiklopedia, Kamus, Glossary dan bahan lain seperti surat kabar serta majalah.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan studi dokumen atau metode penelitian kepustakaan (Library research) yang diperoleh dengan membaca serta mengutip buku-buku dan Putusan Pengadilan Negeri untuk dianalisa dari website resmi

Mahkamah Agung Direktori Putusan

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>. Yaitu :

- a) Putusan PN Simalungun Nomor : 42/Pid.C/2015/PN.Sim.
- b) Putusan PN Jember Nomor : 125/Pid/C/2016/PN.Jmr
- c) Putusan PN Simalungun Nomor: 498/Pid.B/2013/PN.Sim
- d) Putusan PN Jember Nomor: 626/.Pid.B/2014/PN.Jmr

Maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang disajikan yaitu PERMA No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam

¹⁶ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta.Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal. 113.

KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

4. Teknis Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan Hukum dilakukan dengan analisa kualitatif, Yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta regulasi yang berkaitan dengan penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menilai bagaimana prosedur penanganan tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 dan implikasinya dalam proses peradilan pidana sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian Hukum ini, Penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri dari atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan konsep tinjauan umum mengenai Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana ringan, tindak pidana pencurian dan tindak pidana penadahan dan Hukum acara yang mengaturnya lalu dilanjutkan dengan definisi serta unsur-unsur tindak pidana pencurian dan penadahan dalam KUHP.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan secara jelas mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terkait penyelenggaraan acara pemeriksaan cepat dalam putusan Hakim perkara pencurian ringan dan penadahan ringan ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan penjatuhan sanksi pidana ditinjau dari aspek kepastian Hukum. Setelah itu materi dikaji dan dianalisa dengan menggunakan, Teori Equality before the law, Teori Kepastian Hukum dan Teori Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian menjelaskan bagaimana implikasi atas diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak Pidana Pencurian ringan dan penadahan ringan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan Hukum dimana berisi kesimpulan dan saran. Untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran penulis terkait konsep penyelesaian tindak pidana ringan dan penerapannya menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.